

Kebijakan Pengembangan Mutu Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Bangsa

Islam Ali Akbar¹, Eko Handoyo², Fathur Rokhman³

Universitas negeri Semarang

islamaliakbar@students.unnes.ac.id, eko.handoyo@mail.unnes.ac.id, fathurrokhman@mail.unnes.ac.id,

*Islami Ali Akbar

ABSTRACT

Education is a fundamental factor in increasing national competitiveness in the era of globalization, including in Indonesia. The quality of national education is a strategic issue that determines the quality of Human Resources (HR) and the country's ability to compete internationally. This study aims to analyze education quality development policies in Indonesia and their implications for increasing national competitiveness. The method used is a qualitative study based on literature and empirical data analysis from reports from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), the Central Statistics Agency (BPS), and the World Economic Forum (WEF). The results show that policies such as the National Education Standards (SNP), the Education Quality Assurance System (SPMP), and the Independent Learning-Independent Campus (MBKM) have made positive contributions. However, significant challenges such as disparities in quality between regions, limited teacher quality, and technological adaptation remain obstacles. WEF data (2023) shows that Indonesia's global competitiveness index ranks 46th out of 141 countries, while education quality still lags behind several ASEAN countries. The conclusion of this study confirms that improving the quality of education requires policies that focus on equity, increasing teacher professionalism, curriculum innovation, and technology integration to become the main catalyst for strengthening the nation's competitiveness.

Keyword: Quality Of Education, Education Policy, National Competitiveness, Quality Assurance System, National Education

Abstrak : Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi, termasuk di Indonesia. Mutu pendidikan nasional menjadi isu strategis yang menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan negara untuk bersaing di tingkat internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia serta implikasinya terhadap peningkatan daya saing bangsa. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif berbasis studi literatur dan analisis data empiris dari laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Badan Pusat Statistik (BPS), dan World Economic Forum (WEF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti Standar Nasional Pendidikan (SNP), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), dan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) telah memberikan kontribusi positif. Namun, tantangan signifikan seperti disparitas mutu antarwilayah, keterbatasan kualitas pendidik, dan adaptasi teknologi masih menghambat. Data WEF (2023) menunjukkan indeks daya saing global Indonesia berada di peringkat 46 dari 141

Article submission: 01 Des 2025

Article revision: 02 Des 2025

Article acceptance: 03 Des 2025

negara, sementara kualitas pendidikan masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan kebijakan yang berfokus pada pemerataan, peningkatan profesionalisme guru, inovasi kurikulum, dan integrasi teknologi untuk dapat menjadi katalis utama penguatan daya saing bangsa.

Kata Kunci: Kualitas Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Daya Saing Nasional, Sistem Jaminan Kualitas, Pendidikan Nasional.

I. INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional yang berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan global. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif, mutu pendidikan menjadi faktor strategis yang menentukan kemampuan suatu bangsa dalam mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kesejahteraannya. Bangsa dengan kualitas pendidikan yang tinggi cenderung memiliki produktivitas, kreativitas, dan kapasitas inovasi yang kuat, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing nasional (Porter, 1990).

Di Indonesia, isu mengenai mutu pendidikan telah lama menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Namun, dalam implementasinya, mutu pendidikan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan mutu antarwilayah, kualitas pendidik, hingga kesiapan lembaga pendidikan dalam menghadapi era digital.

Laporan World Economic Forum (WEF, 2023) menunjukkan bahwa indeks daya saing global Indonesia berada di peringkat 46 dari 141 negara, masih di bawah Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 27), dan Thailand (peringkat 40). Salah satu faktor utama yang memengaruhi posisi ini adalah kualitas pendidikan dan keterampilan SDM yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Data Human

Development Index (HDI) dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) juga menunjukkan bahwa nilai HDI Indonesia mencapai 73,0, menempatkannya pada kategori “tinggi”, tetapi masih tertinggal dibandingkan Singapura (93,9) dan Malaysia (80,0). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pencapaian mutu pendidikan dan kualitas hidup masyarakat.

Berbagai kebijakan telah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, di antaranya penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), serta reformasi kurikulum melalui kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pendidikan, meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta menumbuhkan inovasi di lingkungan pendidikan (Kemendikbudristek, 2022). Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan implementasi di lapangan, terutama pada satuan pendidikan di daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Selain itu, perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 mengharuskan sistem pendidikan nasional beradaptasi dengan cepat. Kompetensi abad ke-21 seperti critical thinking, creativity, communication, dan collaboration (4C) menjadi kunci bagi peserta didik untuk bersaing di pasar global. Mutu pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik tetapi juga pada penguasaan soft skills, literasi digital, serta nilai-nilai karakter kebangsaan menjadi kebutuhan mendesak (OECD, 2022). Oleh karena itu, kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia perlu diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Mutu pendidikan memiliki korelasi langsung dengan peningkatan daya saing bangsa karena menghasilkan SDM yang kompeten, produktif, dan berinovasi tinggi. Negara-negara maju menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Misalnya, Korea Selatan dan Finlandia mampu mencapai kemajuan ekonomi yang pesat karena keberhasilan mereka membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada inovasi (Hanushek & Woessmann, 2020).

Indonesia memiliki potensi besar dalam hal jumlah penduduk produktif, dengan bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Namun, potensi ini akan menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan yang signifikan. Berdasarkan laporan Global Talent Competitiveness Index

(GTCL, 2023), Indonesia berada pada peringkat 90 dari 134 negara, menandakan masih lemahnya kapasitas SDM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Oleh sebab itu, kebijakan pengembangan mutu pendidikan menjadi langkah strategis untuk mengubah potensi demografi menjadi keunggulan kompetitif bangsa.

Penelitian ini penting dilakukan karena meskipun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tingkat efektivitas dan keberlanjutannya belum sepenuhnya optimal. Diperlukan analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, apa hambatannya, dan bagaimana dampaknya terhadap daya saing nasional.

Mutu pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan sistem pendidikan suatu negara. Secara konseptual, mutu pendidikan tidak hanya mencakup hasil belajar peserta didik (output), tetapi juga mencakup seluruh proses pendidikan yang berlangsung, mulai dari input, manajemen, hingga outcome berupa dampak terhadap masyarakat dan pembangunan nasional (Sallis, 2014).

Menurut Edward Sallis (2014) dalam bukunya *Total Quality Management in Education*, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai “kesesuaian antara layanan pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan, harapan, dan standar yang telah ditetapkan.” Dalam konteks Indonesia, mutu pendidikan diatur secara formal melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari delapan komponen: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (Permendikbud No. 5 Tahun 2022).

Mutu pendidikan yang tinggi dicirikan oleh tercapainya keseimbangan antara efektivitas, efisiensi, relevansi, dan pemerataan (Tilaar & Nugroho, 2012). Pendidikan yang bermutu harus mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan kompetensi abad ke-21. Sejalan dengan hal ini, UNESCO (2022) menegaskan bahwa pendidikan bermutu harus menumbuhkan *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*.

Dalam konteks kebijakan publik, mutu pendidikan berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas intervensi pemerintah terhadap pembangunan SDM. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan bukan hanya persoalan akademik, tetapi merupakan strategi nasional untuk memperkuat daya saing bangsa (Mulyasa, 2018).

Kebijakan pendidikan nasional Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur tujuan, prinsip, dan arah pembangunan pendidikan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing global.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan utama untuk mendorong pengembangan mutu pendidikan. Kebijakan tersebut diawali dengan penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menetapkan kriteria minimal bagi sistem pendidikan di seluruh Indonesia dan menjadi acuan utama dalam penjaminan mutu. Selanjutnya, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diwujudkan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dijalankan oleh lembaga akreditasi, seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Di sisi lain, kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) diperkenalkan untuk memperkuat otonomi satuan pendidikan serta memperluas ruang inovasi dalam kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi. Sejalan dengan itu, Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak juga diluncurkan dengan fokus pada peningkatan kapasitas profesional pendidik sebagai motor penggerak transformasi mutu di tingkat sekolah.

Lebih jauh, daya saing bangsa tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari daya saing sosial dan budaya, seperti etos kerja, kreativitas, moralitas, dan kepemimpinan. Pendidikan yang bermutu tinggi harus mampu membentuk karakter peserta didik yang jujur, disiplin, dan memiliki integritas. Oleh karena itu, kebijakan mutu pendidikan perlu mengintegrasikan dimensi akademik dan karakter bangsa secara seimbang (Tilaar, 2012).

Dengan demikian, hubungan antara mutu pendidikan dan daya saing bangsa bersifat kausal dan sinergis: mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang unggul, sedangkan SDM yang unggul akan memperkuat daya saing nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini menegaskan urgensi reformasi pendidikan yang tidak hanya fokus pada pemerataan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi global.

Model pengembangan mutu pendidikan dapat dijelaskan melalui pendekatan Total Quality Management (TQM) dan Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan).

Konsep ini diadaptasi dari dunia industri dan diterapkan dalam sektor pendidikan untuk membangun budaya mutu yang berkesinambungan (Sallis, 2014).

Dalam model TQM, mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah atau pemerintah, tetapi menjadi komitmen seluruh elemen pendidikan—guru, siswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Penerapan TQM di pendidikan menekankan prinsip “do the right things right the first time”, yaitu melaksanakan proses pendidikan dengan benar sejak awal agar hasilnya berkualitas.

Selain TQM, pendekatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi kerangka operasional utama di satuan pendidikan. SPMI mengacu pada siklus P-D-C-A (Plan–Do–Check–Act), yang menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2023). Dengan pendekatan ini, sekolah dan perguruan tinggi diharapkan dapat membangun budaya mutu yang mandiri tanpa selalu bergantung pada intervensi eksternal.

Secara konseptual, pengembangan mutu pendidikan di Indonesia dapat dipahami sebagai suatu proses yang bersifat sistemik dan terintegrasi. Proses ini bertujuan untuk memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengembangan mutu juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan tuntutan dinamika pasar kerja serta kebutuhan masyarakat. Tujuan berikutnya adalah menumbuhkan serta mengukuhkan budaya belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) dalam diri setiap peserta didik. Pada tataran yang lebih makro, seluruh upaya ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia melalui penguatan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu beradaptasi di kancah global.

II. LITERATURE REVIEW

Berdasarkan laporan Kemendikbudristek (2023), program *Sekolah Penggerak* telah menjangkau 14.000 sekolah di 514 kabupaten/kota dengan peningkatan skor literasi dan numerasi rata-rata sebesar 8,3 poin dalam asesmen nasional tahun 2022–2023. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan transformasi pendidikan mulai menunjukkan hasil positif dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Namun, tantangan yang masih dihadapi antara lain disparitas antarwilayah, ketimpangan sarana-prasarana, dan kualitas guru yang belum merata. Sebagai contoh, BPS (2023) mencatat bahwa rasio guru bersertifikat di daerah tertinggal baru mencapai 38,5%, sedangkan di daerah perkotaan

sudah di atas 75%. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Daya saing bangsa (*national competitiveness*) secara umum diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dalam perekonomian global melalui inovasi, produktivitas, dan efisiensi SDM (World Economic Forum, 2023). Pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk kualitas SDM yang menjadi fondasi utama daya saing nasional. Menurut Hanushek dan Woessmann (2020), peningkatan mutu pendidikan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi nasional. Negara dengan skor literasi dan numerasi tinggi seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang menunjukkan korelasi positif antara mutu pendidikan dan produktivitas ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, hubungan ini juga dapat dilihat melalui data empiris. Berdasarkan laporan Global Competitiveness Index (WEF, 2023), komponen “Skills” yang menilai kualitas tenaga kerja Indonesia memperoleh skor 59,7/100, di bawah rata-rata ASEAN sebesar 67,4/100. Sementara itu, laporan Programme for International Student Assessment (PISA, 2022) menunjukkan bahwa rata-rata skor kemampuan membaca siswa Indonesia adalah 371, matematika 379, dan sains 396, jauh di bawah rata-rata OECD (487).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan dasar dan menengah. Desentralisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemerataan mutu pendidikan antarwilayah. Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi kendala kapasitas daerah dan ketimpangan sumber daya manusia antar daerah (Nugroho, 2019). Data tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia dalam memperkuat daya saing bangsa. Peningkatan kompetensi dasar peserta didik, terutama literasi, numerasi, dan sains, harus menjadi fokus utama kebijakan pendidikan jangka menengah dan panjang.

III. METHODS

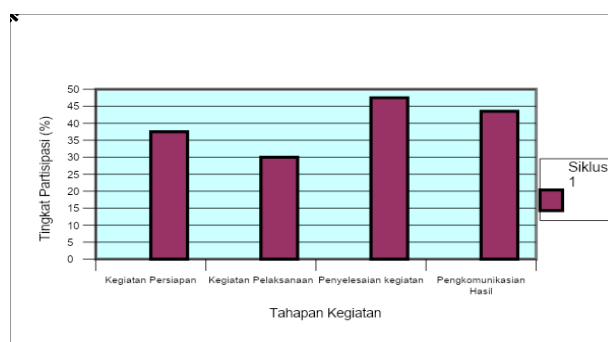
Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran,

subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. Target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-sub heading. Sub-sub judul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, TNR-11 unbold, rata kiri. Tabel dituliskan di tengah atau di akhir setiap teks deskripsi hasil/perolehan penelitian. Bila lebar tabel tidak cukup ditulis dalam setengah halaman, maka dapat ditulis satu halaman penuh. Judul tabel ditulis dari kiri rata tengah, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Kalau lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal (*at least 12*). Sebagai contoh, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Skor Kemampuan Siswa Dalam Pembelajaran

No.	Aspek Penilaian	Skor
1	Kecerdasan	100

Berdasarkan Hasil pada tabel 1 berupa gambar, atau data yang dibuat gambar/skema/grafik/diagram/sebangsa-nya, pemaparannya juga mengikuti aturan yang ada; judul atau nama gambar ditaruh di bawah gambar, dari kiri, dan diberi jarak 1 spasi (*at least 12*) dari gambar. Bila lebih dari 1 baris, antarbaris diberi spasi tunggal, atau *at least 12*. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.



Gambar 1 Tingkat Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Diskusi Pembelajaran

IV. RESULTS

Pengembangan mutu pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik internal maupun eksternal. Tantangan mendasar yang pertama adalah

ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki disparitas akses dan kualitas yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024, di mana DKI Jakarta mencapai 82,2, sedangkan Papua hanya 61,2 (BPS, 2024). Ketimpangan ini diperparah dengan lemahnya pemerataan sarana dan prasarana, serta ketersediaan guru berkualitas, di mana data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan sekitar 38% guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum memenuhi kualifikasi akademik minimal S1.

Tantangan kedua terletak pada kualitas guru dan tenaga kependidikan itu sendiri. Meskipun program sertifikasi dan pelatihan telah dijalankan, kompetensi pedagogik guru Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD menurut laporan OECD (2023). Hanya sekitar 43% guru yang mampu menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan teknologi digital secara efektif. Persoalan lain adalah distribusi guru yang tidak merata, dengan daerah perkotaan mengalami surplus, sementara daerah terpencil kekurangan hingga 25% dari kebutuhan ideal. Tantangan ketiga adalah transformasi digital dan kesenjangan literasi teknologi. Percepatan transformasi digital selama pandemi justru mengungkap kesenjangan digital yang lebar. Data Kemkominfo (2023) menyebutkan bahwa sekitar 12.000 sekolah di wilayah terpencil belum memiliki akses internet memadai. Selain itu, Survei PISA 2022 mengungkap bahwa hanya 52% siswa Indonesia yang memiliki kemampuan literasi digital dasar, suatu angka yang jauh di bawah rata-rata negara ASEAN sebesar 67%.

Tantangan keempat adalah relevansi kurikulum dengan dunia kerja. Kurikulum pendidikan dinilai kurang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Sebuah survei dari World Bank (2023) menunjukkan bahwa 34% lulusan SMA dan SMK tidak bekerja sesuai dengan bidang keahlian mereka. Fakta ini mengindikasikan perlunya pendekatan kurikulum yang lebih berbasis kompetensi, fleksibel, dan terintegrasi dengan industri. Tantangan kelima adalah lemahnya sistem evaluasi dan akuntabilitas. Sistem evaluasi mutu pendidikan saat ini dinilai masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara substansial. Proses akreditasi sekolah dan asesmen nasional, yang seharusnya menjadi instrumen reflektif, sering kali hanya dijadikan formalitas. Akibatnya, budaya mutu yang kuat dan berkelanjutan di tingkat sekolah belum dapat tumbuh dengan optimal (Suryani, 2023). Untuk merumuskan strategi yang efektif, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

dapat digunakan untuk memetakan kondisi pengembangan mutu pendidikan di Indonesia:

Tabel 2. Analisis SWOT Kebijakan Pengembangan Mutu Pendidikan Di Indonesia

Aspek	Uraian
Strengths (Kekuatan)	Dukungan regulatif yang kuat (UU Sisdiknas, SNP, SPMP); meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pendidikan; program Merdeka Belajar dan digitalisasi pendidikan.
Weaknesses (Kelemahan)	Kesenjangan mutu antarwilayah; rendahnya kompetensi guru di bidang pedagogik digital; sistem evaluasi yang belum efektif.
Opportunities (Peluang)	Bonus demografi; potensi kolaborasi dengan sektor industri; perkembangan teknologi digital untuk pembelajaran adaptif.
Threats (Ancaman)	Globalisasi dan persaingan regional ASEAN; perubahan teknologi yang cepat; ketimpangan sosial ekonomi yang berdampak pada akses pendidikan.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang besar untuk memperkuat sistem pendidikan nasional, tanpa pembenahan kelemahan internal, kebijakan mutu akan sulit mencapai hasil optimal.

Berdasarkan analisis data empiris dan identifikasi tantangan mutu pendidikan, dirumuskan enam strategi utama untuk penguatan mutu pendidikan nasional. Pertama, penguatan mutu pendidikan nasional dapat dilakukan melalui penguatan sistem penjaminan mutu terintegrasi. Pemerintah perlu mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara digital dan adaptif. Optimalisasi platform daring terpadu, seperti Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan (SIPMP), akan memudahkan sekolah dalam melaksanakan siklus PPEPP secara lebih efisien dan transparan, sehingga pada akhirnya memperkuat budaya reflektif di tingkat satuan pendidikan. Kedua, profesionalisasi guru merupakan pilar penting yang harus didukung melalui pelatihan digital dan penguasaan kompetensi abad ke-21. Guru perlu dibekali dengan keterampilan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis (4C). Perluasan program pelatihan berbasis *microlearning* dan sertifikasi kompetensi digital menjadi krusial. Dukungan bagi strategi ini datang dari riset UNESCO (2023) yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat partisipasi guru dalam pelatihan digital lebih dari 60% mengalami peningkatan hasil belajar rata-rata sebesar 15%.

Ketiga, upaya revitalisasi kurikulum berbasis kompetensi mutlak diperlukan. Kurikulum Merdeka harus terus dikembangkan agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan industri dan konteks lokal. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperluas kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha melalui program magang, proyek kolaboratif, serta integrasi pendidikan kewirausahaan pada jenjang menengah dan tinggi. Keempat, strategi ini harus diiringi dengan komitmen untuk pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan. Pemerintah dituntut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) dapat menjadi katalisator pemerataan akses. Selain itu, pemberian insentif yang memadai bagi guru yang bertugas di daerah terpencil akan memperkuat distribusi tenaga pendidik yang merata.

Kelima, reformasi sistem evaluasi dan akreditasi diperlukan untuk membangun akuntabilitas yang bermakna. Sistem akreditasi dan asesmen harus diarahkan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kepatuhan administratif. Evaluasi mutu pendidikan perlu mengukur aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*), kreativitas, dan nilai-nilai karakter, melampaui sekadar pengukuran hasil ujian akademik tradisional. Keenam, seluruh upaya tersebut memerlukan kolaborasi multisektor dan inovasi kebijakan. Penguatan mutu pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, tetapi memerlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan industri, lembaga riset, dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator untuk membangun kemitraan strategis guna mengembangkan inovasi pendidikan yang memadukan teknologi modern dengan kearifan lokal.

Keberhasilan kebijakan mutu pendidikan bergantung pada implementasi strategi berkelanjutan yang sistematis. Pertama, desentralisasi pendidikan berbasis data memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk merancang kebijakan mutu berdasarkan data pendidikan lokal yang valid. Kedua, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi digital melalui dashboard nasional memungkinkan pemantauan mutu pendidikan secara real-time sehingga pengambilan kebijakan dapat dilaksanakan dengan pendekatan berbasis bukti. Ketiga, pemerintah perlu menjalin kemitraan internasional dengan negara-negara seperti Finlandia dan Korea Selatan untuk mempelajari praktik terbaik dalam membangun sistem pendidikan yang fleksibel, kreatif, dan berorientasi

pada siswa. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis tersebut, sistem pendidikan nasional diharapkan mampu bertransformasi menjadi sebuah ekosistem pembelajaran yang inklusif, berkelanjutan, serta kompetitif di tingkat global.

V. CONCLUSION AND SUGGESTION

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dalam menganalisis kebijakan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia serta hubungannya dengan peningkatan daya saing bangsa. Hasil kajian mengonfirmasi bahwa meskipun kebijakan seperti Standar Nasional Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Merdeka Belajar telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan capaian pendidikan nasional, efektivitasnya masih terhambat oleh disparitas mutu antarwilayah, keterbatasan kompetensi guru, dan kesenjangan infrastruktur digital. Temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan daya saing bangsa memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, berorientasi pada pemerataan kualitas, dan responsif terhadap kebutuhan kompetensi abad ke-21. Penerapan kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan sistem penjaminan mutu berbasis teknologi, revitalisasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri, serta profesionalisasi guru melalui pelatihan pedagogi digital yang berkelanjutan. Pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi multisektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global, sehingga potensi bonus demografi dapat dioptimalkan sebagai modal menuju Indonesia Emas 20

V. BIBLIOGRAPHY

- Balitbangristek. (2024). *Laporan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Tahun 2023–2024*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Indeks Pembangunan Manusia dan Statistik Pendidikan Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI.
- BPSDMP. (2023). *Laporan Pengembangan Kompetensi Guru Melalui Platform Merdeka Mengajar*. Kemendikbudristek RI.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- Kemendikbudristek. (2023). *Evaluasi Implementasi Program Sekolah Penggerak Tahun 2023*. Jakarta: Sekretariat Ditjen GTK.
- Kemendikbudristek. (2024). *Laporan Digitalisasi Sekolah dan Transformasi Pembelajaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.

- Kemkominfo. (2023). *Statistik Infrastruktur dan Literasi Digital Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- OECD. (2023). *Education Policy Outlook: Indonesia 2023*. Paris: OECD Publishing.
- Suryani, D. (2023). Analisis Kinerja Implementasi Penjaminan Mutu Sekolah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 112–127.
- UNESCO. (2023). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2023). *Human Capital Index 2023 Update*. Washington DC: The World Bank Group.
- World Economic Forum (WEF). (2023). *Global Competitiveness Report 2023*. Geneva: World Economic Forum.